



Analisis Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa

Desni Indah Sari Zai^{1*}, Adrianus Bawamenewi², Amstrong Harefa³,
Berkat Persada Lase⁴

¹⁻⁴Universitas Nias, Indonesia

Alamat: Jalan Yos Sudarso 118 E/S Gunungsitoli, 22812

Korespondensi penulis: desnizhay04@email.com*

Abstract. Problems in learning Pancasila and Citizenship Education (PPKn) for students are caused by various factors, including school factors, teachers, and the students themselves. The purpose of this study is to identify and understand in depth the problems that occur and determine the steps that can be taken to overcome these problems. This study uses a descriptive approach with qualitative methods. The main instrument in this study is the researcher herself, who is tasked with determining the research focus, collecting, analyzing, and interpreting data, and drawing conclusions based on field findings. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. Informants in this study include the principal, PPKn teachers, and students at the UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe. The results of the study indicate that the main problems in PPKn learning are caused by low student interest and motivation, the use of monotonous learning methods by teachers, limited learning media, and minimal supporting facilities and infrastructure at the school. These conditions have an impact on students' lack of understanding of the values of Pancasila and citizenship. To address this issue, various efforts have been made, including requiring teachers to use more varied, innovative, and enjoyable learning methods. Furthermore, schools are expected to provide support by organizing teacher training and providing learning facilities and infrastructure, such as libraries, audio-visual media, and classrooms that support active and interactive teaching and learning activities. These steps are expected to make PPKn learning more effective and beneficial for students. Problems in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning for students are caused by various factors, including school, teacher, and student factors. The purpose of this study is to identify and understand in-depth the problems that occur and determine steps that can be taken to address these issues.

Keywords: Learning Motivation, Learning, PPKn, Problems, Students.

Abstrak. Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor sekolah, guru, dan siswa itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam permasalahan yang terjadi serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertugas menentukan fokus penelitian, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data, dan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pembelajaran PPKn disebabkan oleh rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, penggunaan metode pembelajaran yang monoton oleh guru, keterbatasan media pembelajaran, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung di sekolah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya guru dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, inovatif, dan menyenangkan. Selain itu, sekolah juga diharapkan memberikan dukungan dengan menyelenggarakan pelatihan untuk guru dan melengkapi sarana prasarana pembelajaran, seperti perpustakaan, media audio visual, serta ruang kelas yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang aktif dan interaktif. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran PPKn dapat berlangsung lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor sekolah, guru, dan siswa itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam permasalahan yang terjadi serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Pembelajaran, Permasalahan, PPKn, Siswa.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah sesuatu hal yang penting pada zaman sekarang ini, siapapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Tetapi kenyataannya di dunia ini terutama di Indonesia pendidikan merupakan sesuatu yang mahal bahkan disepelekan oleh beberapa pihak dikarenakan sudut pandang yang masih sangat tabu dengan pentingnya pendidikan. Pendidikan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada perkembangan pesat, banyak sekolah swasta bahkan negeri yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Bahkan banyak sekolah yang saat ini memiliki tenaga pendidik atau guru yang masih muda dan berprestasi, sehingga membuat dunia pendidikan di Indonesia semakin hari semakin mengalami perubahan. Namun, memang di beberapa daerah terutama daerah pelosok pendidikan masih tertinggal dan pemerintah pun secara perlahan mulai memperbaiki sistem pendidikan di daerah pelosok.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khusus nya Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu materi pelajaran yang diajarkan di sekolah, bahkan sudah ada sejak siswa berada di sekolah dasar. Pentingnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sejak tingkat sekolah dasar adalah untuk mengenalkan siswa dengan rasa Nasionalisme, membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam materi pembelajaran PPKn dan siswa dapat memahami tentang Hak Manusia (HAM).

Sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan nilai-nilai karakter anak bangsa, PPKn menempati posisi yang sangat strategis dalam pembentukan karakter warga negara Indonesia. Nasution dalam Aritonang (2023), selain penanaman nilai-nilai karakter, fokus PPKn adalah menjadikan generasi muda kritis, aktif dan demokratis dalam arti sadar akan hak dan haknya serta mendidik mereka menjadi orang Indonesia yang beradab, Menjadi warga Negara yang baik, Bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. PPKn sangat penting dan mendesak bagi generasi muda, sehingga perlu mempersiapkan studinya secara tepat sasaran. PPKn sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pendidikan karakter memerlukan perencanaan yang matang agar bisa di aplikasikan pada peserta didik dengan baik.

Supriyanto dalam Suyahman (2020) mengemukakan bahwa “tujuan pembelajaran PPKn yaitu mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki kebanggaan terhadap Indonesia, cinta tanah air, tanggung jawab, percaya diri dalam berinteraksi”. Pembelajaran merupakan kegiatan atau proses belajar dan mengajar. Selanjutnya Uno dalam Suyahman (2020) mengatakan “Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa.” Kegiatan pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang terutama terdiri dari pendidik dan peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada pengoptimalan upaya kegiatan belajar dan mengajar.

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 2010). Terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru (Mufarrokah, 2009). Akan tetapi pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa sekolah bahwa masih banyak guru yang tidak membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, ditambah dengan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran tidak tepat dan cenderung monoton (Zulfadli, 2016).

Menurut Vutra (2019) “Problematika pembelajaran adalah berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran”. Problematika dalam proses pembelajaran dapat ditelusuri dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Dalam Permasalahan Pembelajaran PPKn dapat disebabkan oleh berbagai faktor, minimnya variasi metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, terbatasnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik, kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah. (Sari, 2024).

Pelaksanaan Pembelajaran PPKn di berbagai jenjang sekolah masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, metode pembelajaran yang dominan bersifat ceramah dan hafalan membuat siswa pasif dan kurang terlibat dalam proses refleksi nilai. Kedua, media dan sumber belajar yang digunakan cenderung terbatas pada buku teks konvensional, tanpa dukungan multimedia atau studi kasus terkini, sehingga materi terasa abstrak dan kurang kontekstual. Ketiga, kompetensi guru dalam merancang pembelajaran inovatif belum merata sebagian guru belum terbiasa memanfaatkan teknologi edukasi maupun strategi pembelajaran kolaboratif. Keempat, motivasi dan minat siswa terhadap PPKn sering menurun karena pelajaran ini tidak

selalu dipandang relevan dengan kebutuhan mereka atau tidak masuk dalam tolok ukur ujian seleksi lanjut.

Dalam pembelajaran PPKn kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh guru. Dalam melakukan proses belajar mengajar Kreativitas guru memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas utamanya dalam mengajar, membimbing, mendidik, dan motivasi peserta didik, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Mengoptimalkan ilmu dan keahlian Guru harus menggabungkan ilmu dan keahlian mereka sebagai *Teacher Scholar* untuk menghasilkan, merespon, mewujudkan ide, dan menanggapi berbagai permasalahan dalam pendidikan agar peserta didik merasa bosan dan tidak mengalami kesulitan dalam belajar.

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe; Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada di Siswa UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Analisis Permasalahan Dalam Pembelajaran

a. Pengertian Analisis

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. (Puspitasari,2020).

b. Pengertian Permasalahan Pembelajaran

Istilah Permasalahan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya permasalahan atau masalah, Permasalahan (*problematic*) adalah suatu persoalan yang belum terungkap hingga perlu diadakan penelitian ilmiah dan metode penyelesaian yang

tepat. Problematika merupakan permasalahan-permasalahan atau kesenjangan-kesenjangan yang ada, yang menjadi tantangan yang harus dicari solusinya. Wulansari (2021). Sejalan dengan pemahaman tersebut, “Problematika merupakan suatu keadaan yang menimbulkan persoalan atau masalah dimana dalam persoalan tersebut perlu adanya pemecahan.” Dwinta (2021:6).

Secara Nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu system yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ariani (2022:6). Adapun hasil pembelajaran adalah perubahan perilaku yang terjadi pada individu setelah mengalami proses belajar. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti bahwa seseorang telah berhasil memperoleh sesuatu yang baru atau meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki setelah mengikuti suatu proses pembelajaran.

Permasalahan pembelajaran adalah kesukaran atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar. Kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Menurut Adi Vutra (2019:9) menjelaskan tiga macam bentuk masalah/problematika pembelajaran yaitu:

- a) Masalah (*Problem*) yang bersifat metodologis yaitu masalah yang terkait dengan upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas penyampaian materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran.
- b) Masalah yang bersifat kultural yaitu masalah yang berkaitan dengan karakter atau watak seorang guru dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap proses pembelajaran. Masalah ini muncul dari cara pandang guru terhadap peran guru dan makna pembelajaran.
- c) Masalah yang bersifat sosial, yaitu masalah yang terkait dengan hubungan dan komunikasi antara guru dengan elemen lain yang ada di luar guru, seperti adanya kurang harmonisan antara guru dan siswa, antara pimpinan sekolah dengan siswa, bahkan diantara sesama siswa. Ketidak harmonisan antara guru dan siswa bisa disebabkan akibat pola atau system kepemimpinan yang kurang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan.

Menurut Muhith (2018) “Terdapat dua faktor yang sangat menentukan proses dan hasil pembelajaran, yaitu: guru sebagai subjek pembelajaran dan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran”. Tanpa adanya guru dan peserta didik pembelajaran

tidak dapat berlangsung dengan baik, akan tetapi tidak boleh mengabaikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas proses tersebut, misalnya faktor media dan instrumen pembelajaran, fasilitas belajar, sarana dan prasarana sekolah, fasilitas laboratorium, manajemen sekolah, sistem pembelajaran dan evaluasi, kurikulum, metode, dan strategi pembelajaran.

Dimiyati dan Mudjiono (2010:235) mengemukakan bahwa problematika pembelajaran berasal dari faktor internal yaitu faktor dari diri siswa yang mengalami berbagai masalah, jika mereka dapat menyelesaikannya maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Berbagai faktor internal dalam diri siswa, yaitu: sikap terhadap belajar; motivasi belajar; konsentrasi belajar; kemampuan mengolah bahan belajar; kemampuan menyimpan; menggali hasil belajar yang tersimpan; kemampuan berprestasi siswa; rasa percaya diri siswa; intelegensi dan keberhasilan belajar.

Menurut Muhith, A. (2018). “Proses belajar yang didorong oleh motivasi intrinsik siswa akan menjadi bertambah kuat, bila didorong oleh lingkungan siswa”. Dengan kata lain aktivitas belajar dapat meningkat bila program pembelajaran disusun dengan baik. Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan oleh guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar. Kontribusi tersebut terhadap siswa, ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar mereka, faktor-faktor eksternal tersebut sebagai berikut: faktor kurikulum; faktor guru; faktor lingkungan sosial; faktor lingkungan keluarga.

c. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Somantri (2001:159) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai “seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora dan kegiatan dasar manusia diorganisasikan dan disajikan secara psikologi dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan ”. Seleksi dan adaptasi itu bermakna bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah disiplin ilmu yang kolaboratif dari berbagai ilmu sosial lain yang menjadi kesatuan utuh sehingga kaya akan pengetahuan dan nilai. Sementara pendidikan kewarganegaraan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:49) ialah “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebuah mata pelajaran yang bertujuan untuk

membentuk warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya berdasarkan pada landasan idil dan konstitusional.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menurut Winataputra (Winarno dan Wijianto, 2010:5) “sebagai *citizenship education* yang secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan proses pendidikan”. Artinya pendidikan kewarganegaraan mengemban tanggung jawab dalam membentuk kognitif, karakter, dan kepribadian warga negara agar mampu menjadi seorang warga negara yang diharapkan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral yang berlandaskan kepada ideologi bangsa yaitu Pancasila. “Moral tidak dapat dilepaskan dari unsur rasio, sehingga moral pun harus juga mempertimbangkannya dari segi rasio. Tingkah laku baik secara moral, selalu merupakan tingkah laku yang rasional, suatu tingkah laku yang sengaja dilakukan, dilakukan secara mau dan tahu” (Daryono, dkk., 2008:14). Tingkah laku yang bermoral itu sejalan dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Pancasila. Kesadaran untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai moral tersebut dilakukan atas adanya keinginan dan pengetahuan yang mendasari pemikiran atau rasional seseorang bahwa tingkah laku tersebut memang baik dan benar untuk diterapkan. Oleh karena itulah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional agar dapat membentuk keperibadian warga negara yang bermoral sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Visi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia secara garis besar yaitu “sebagai sumber pedoman dan nilai untuk mengembangkan program studi yang berguna mengantarkan siswa dan mahasiswa untuk bisa memantapkan kepribadian bangsa seutuhnya” (Malinda, 2016). Kepribadian bangsa yang utuh bersumber dari nilai-nilai bangsa yang dianut dalam ideologi negara, Pancasila. Sedangkan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu ialah “membantu siswa dan mahasiswa meneguhkan pendiriannya sebagai warga negara yang konsisten mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan juga membantu mewujudkan pribadi bangsa yang nasionalis dan religious untuk terus dikembangkan hingga generasi selanjutnya” (Malinda, 2016). Upaya meneguhkan pendirian tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya kewajiban untuk mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Tujuan utama PPKn adalah *to make a good and smart citizen* atau dengan kata lain adanya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Somantri (2001:279) yaitu “tujuan umum pendidikan kewarganegaraan ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan sebagai warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis Pancasila sejati”. Teori tersebut menyiratkan tentang karakteristik seorang warga negara yang dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik yang merupakan tujuan mendasar dari adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sedangkan tujuan pembelajaran PPKn dalam Departemen Pendidikan Nasional (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
 - b) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
 - d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Saat ini, prinsip pembelajaran yang dikembangkan dalam pelajaran PPKn sudah bergeser dari pendekatan *faculty psychology* menjadi *field psychology* dimana strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan sesuai pendekatan *field psychology* adalah strategi pembelajaran kontinum atau pembelajaran yang mengkombinasikan antara sudut ekstrem inkuiri dan sudut ekstrem ekspositori. Dengan demikian, pembelajaran lebih bersifat humanis karena memperhatikan aspek-aspek sifat manusia yang pada hakikatnya sejak lahir sudah memiliki potensi untuk berkembang (Wahab dan Sapriya, 2011: 343). Pembelajaran merupakan kegiatan atau proses belajar dan mengajar. Menurut Uno (2011:2) “pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa”. Sehingga dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran seperti pendidik, peserta didik, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar dapat terjadi proses belajar (Yuberti 2014:26). Teori pembelajaran menghubungkan antara kegiatan pembelajaran dengan proses-proses psikologis dalam diri

siswa sedangkan teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses -proses psikologis dalam diri siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan pengembangan nilai-nilai dan intelektualitas seorang warga negara. Namun dibandingkan dengan aspek kecerdasan, nilai-nilai lebih menjadi perhatian atau fokus dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nilai merupakan rujukan untuk bertindak dan tolak ukur bagi seseorang untuk mempertimbangkan perilaku tentang baik atau tidak baik suatu tindakan itu dilakukan (Putri, 2012). Oleh sebab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menitik beratkan kepada internalisasi nilai dalam diri warga negara, “maka proses pendidikan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku” (Karliani, 2016).

Strategi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa dapat disesuaikan dengan kendala yang dihadapi, baik itu dari aspek siswa, guru, metode, maupun lingkungan belajar. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan: strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif; penguatan nilai-nilai pancasila dalam kegiatan sehari-hari; pengembangan kompetensi guru; penyesuaian materi pembelajaran; meningkatkan partisipasi siswa; dukungan lingkungan sekolah dan orang tua; dan evaluasi dan tindak lanjut.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Sukmadinata (Moh. Nazir 1999: 63) Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dengan interpretasi yang tepat, guna memahami fenomena yang sedang diamati serta untuk memberikan gambaran yang akurat tentang sifat-sifat dari fenomena tersebut, baik itu dalam kelompok maupun individu. Pendekatan ini digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendapat Meleong, (2017:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh, melalui deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alamiah. Pendekatan ini mengandalkan metode alamiah untuk menjelajahi dan memahami fenomena tersebut.

Data primer dalam penelitian ini meliputi sumber yang secara tidak langsung memberikan data dokumen. Data tersebut diambil dari proses observasi (pengamatan) dan interviu (wawancara) yang melibatkan informan yang berpengaruh dalam bidang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kepala sekolah dan 3 orang siswa. Data kedua ini merupakan data sekunder, di mana jenis sumber informasi ini bersumber dari literatur. Materi literatur yang dipakai termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang serta *website* yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data yang mendukung data primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

- Permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe bahwa permasalahan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zakieli Waruwu.S.Th, selaku kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Permasalahan dalam pembelajaran PPKn pada siswa bersumber dari berbagai faktor, termasuk metode pembelajaran yang kurang variatif, di mana guru hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Rendahnya minat siswa, materi yang kurang kontekstual, sistem evaluasi yang terbatas, lingkungan belajar yang kurang mendukung, serta keterbatasan peran guru dalam mengajar secara inovatif. Kemudian karakter siswa yang mulai menuruns yang di akibatkan banyaknya pengaruh negatif dari media sosial dan internet yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam PPKn. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk membentuk karakter siswa di era sekarang.

Hal senada juga di ungkapkan Ibu Mariani Hia,S.Pd, selaku Guru PPKn di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Permasalahan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) pada siswa adalah di sebabkan oleh beberapa factor dasar, yaitu factor internal siswa, di mana kurangnya motivasi siswa. Banyak siswa menganggap bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mata pelajaran yang kurang menarik dan minimnya keterampilan kritis siswa, dimana siswa kurang terdorong dalam berdiskusi yang menyebabkan siswa cenderung pasif. Dan kurangnya pemahaman konsep yang mengakibatkan siswa kesulitan memahami konsep PPKn. Selain itu permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di sebabkan oleh teknologi yang kurang mendukung guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Menurut Zesrilina Halawa selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan pada siswa disebabkan pada metode pembelajaran yang monoton, guru PPKn masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Guru sering menggunakan metode ceramah sebagai metode utama, sehingga pembelajaran menjadi satu arah dan kurang interaktif.

Juga didukung dengan hasil wawancara Yeftha Angelius Zai selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Permasalahan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada siswa karna Minimnya penggunaan teknologi dan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas dan daya tarik mata pelajaran ini bagi siswa.

Sementara itu, menurut Sri Andini Zai selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembelajaran berbasis proyek seharusnya menjadi strategi utama karena PPKn berkaitan langsung dengan praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran berbasis proyek dalam PPKn masih jarang diterapkan di sekolah-sekolah. Pembelajaran sering kali masih bersifat teoritis dan berbasis hafalan, tanpa adanya keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan.

Dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe berasal dari beberapa factor yang saling berkaitan seperti Guru PPKn yang kurang variatif dalam menggunakan Metode pembelajaran, yang hanya menggunakan metode ceramah saat proses belajar mengajar. Sehingga membuat siswa tidak aktif, bosan, mengantuk dan lupa akan materi telah dijelaskan oleh guru. Rendahnya motivasi siswa terhadap pembelajaran PPKn sehingga menyebabkan menurunnya semangat belajar siswa. Banyak siswa yang menganggap bahwa pembelajaran PPKn kurang menarik. Kemudian permasalahan pembelajaran PPKn juga di sebabkan kurangnya pemakaian media dan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran siswa hanya menggunakan buku sebagai bahan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

- Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe bahwa Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zakieli Waruwu.S.Th, selaku kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek siswa, guru, lingkungan sekolah. Dengan cara Meningkatkan Kualitas Guru PPKn dengan melakukan Pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang metode pembelajaran inovatif. Kemudian Meningkatkan motivasi siswa dengan cara menyajikan pembelajaran lebih menarik, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan tantangan dan penghargaan kepada siswa supaya lebih giat dan semangat untuk belajar. Serta membentuk lingkungan yang menciptakan lingkungan akan saling menghargai, serta mengedepankan nilai-nilai pancasila.

Hal senada juga di ungkapkan Ibu Mariani Hia,S.Pd, selaku Guru PPKn di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memerlukan strategi yang kreatif dan inovatif. Mengaitkan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari, Siswa akan lebih termotivasi jika mereka melihat bahwa materi

PPKn relevan dengan kehidupan mereka. Memberikan contoh konkret dari lingkungan sekitar, misalnya peran siswa dalam menjaga ketertiban di sekolah. Menerapkan Teknologi dalam Pembelajaran dengan Menggunakan video edukatif. yang membahas materi PPKn dengan cara menarik. Sehingga materi . yang diberikan kepada siswa dapat di ingat oleh siswa dan tidak bosan dalam proses belajar.

Menurut Zesrilina Halawa selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Guru harus Menerapkan Metode Pembelajaran yang Aktif dan Inovatif. Agar siswa lebih terlibat dalam pembelajaran, guru harus menggunakan metode yang mendorong interaksi dan partisipasi aktif, seperti: Diskusi dan Debat: Mengajak siswa berdiskusi atau berdebat tentang isu-isu kewarganegaraan, seperti hak asasi manusia, demokrasi, atau korupsi, untuk melatih berpikir kritis. Role-playing (Simulasi Peran): Misalnya, siswa dapat memainkan peran sebagai pahlawan yang berjuang untuk meraih kemerdekaan, Studi Kasus: Guru dapat memberikan kasus nyata terkait nilai-nilai Pancasila untuk dianalisis oleh siswa, sehingga mereka bisa memahami konsep secara lebih konkret.

Juga didukung dengan hasil wawancara Yeftha Angelius Zai selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Guru harus bisa menggunakan video atau animasi untuk menjelaskan konsep-konsep dalam PPKn secara lebih visual dan menarik. Penggunaan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Dan sekolah juga mendukung dalam bentuk sarana dan prasarana seperti infokus, proyektor yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar supaya proses belajar mengajar menjadi menarik.

Sementara itu, menurut Sri Andini Zai selaku siswa kelas VII UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe menyatakan bahwa:

Sekolah dan guru PPKn harus Melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata: Siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar dan mencari solusi, misalnya kampanye kebersihan sekolah atau simulasi pemilu di sekolah, contohnya dalam pemilihan pengurus osis di sekolah. Mendorong kolaborasi antar siswa: Proyek dikerjakan dalam kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab social. Mendorong kolaborasi antar siswa: Proyek dikerjakan dalam kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab sosial.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe yaitu dengan melakukan pelatihan kepada guru

PPKn supaya lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan pembelajaran, sekolah melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, seperti proyektor, infokus dan teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Meningkatkan dan memotivasi siswa supaya lebih semangat belajar dan mengaitkan mata pelajaran dengan lingkungannya sekitar. Menerapkan metode pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, cepat tanggap, dan memahami materi dengan mudah dan mudah juga untuk mengingat materi.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi di lapangan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Analisis Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe tahun ajaran 2024/2025 dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan subjek dan tidak lupa mengumpulkan dan mengambil dokumentasi. Untuk memudahkan pembaca, dibawah ini akan membahas satu persatu hasil penelitian yang dilakukan.

- Permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta kesadaran berbangsa dan bernegara pada siswa. Mata pelajaran ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang menitikberatkan pada pembinaan warga negara agar memahami dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, cakap, dan individual sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa PKn mempunyai banyak makna namun intinya sama yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun dalam praktiknya, pembelajaran PPKn di sekolah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Adapun permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe yaitu disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, rendahnya motivasi siswa, serta rendahnya minat belajar siswa dan media dan teknologi yang kurang memadai penyebab utama

permasalahan ini. Selain itu, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kurangnya relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa kurang antusias dalam mempelajari PPKn. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan siswa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar siswa, minimnya variasi metode pembelajaran, Terbatasnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik, kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah, seperti LCD proyektor dan komputer/laptop, serta pengaruh lingkungan dan media social, kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah.

- Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe.

Permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe harus diatasi karena mata pelajaran ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran berbangsa serta bernegara. Upaya mengatasi permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan guru, sekolah, siswa, dan lingkungan sekitar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe yaitu Meningkatkan Kompetensi Guru dengan melakukan pelatihan kepada guru dan melakukan pemberdayaan kepada guru, membuat metode pembelajaran yang inovatif kreatif yang bisa mengajak siswa untuk lebih aktif, berani dan mampu memecahkan masalah dan mudah memahami materi, serta peningkatan motivasi siswa dalam proses pembelajaran supaya siswa lebih memahami tujuan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Dan sekolah juga melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung guru dalam menjelaskan materi dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat memanfaatkan media pembelajaran untuk siswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan dalam pembelajaran PPKn pada siswa bersumber dari berbagai faktor, termasuk metode pembelajaran yang kurang variatif, rendahnya minat siswa, materi yang kurang kontekstual, sistem evaluasi yang terbatas, lingkungan belajar yang kurang mendukung, serta keterbatasan peran guru dalam mengajar secara inovatif dan Minimnya penggunaan teknologi dan media pembelajaran interaktif. Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 7 Mandrehe. Mengatasi permasalahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada siswa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek siswa, guru, lingkungan sekolah. Dengan cara Meningkatkan Kualitas Guru PPKn dengan melakukan Pelatihan dan pengembangan profesional. Kemudian Meningkatkan motivasi siswa dengan cara menyajikan pembelajaran lebih menarik, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan tantangan dan penghargaan kepada siswa supaya lebih giat dan semangat untuk belajar. Guru harus Menerapkan Metode Pembelajaran yang Aktif dan Inovatif dalam Penggunaan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Dan sekolah juga mendukung dalam bentuk sarana dan prasarana seperti infokus, proyektor yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar supaya proses belajar mengajar menjadi menarik.

References

- Adi Vutra, N. (2019). Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu (Disertasi Doktoral, IAIN Bengkulu).
- Almujtaba, P. W. (2021). Guru dan profesionalitas dalam pendidikan.
- Amelia. (2022). Analisis permasalahan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Rajeg III. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 901-904. <https://doi.org/10.24036/jippsd.v4i2.112274>
- Ananda. (2019). Statistik pendidikan. Medan: CV Widya Puspita.
- Ariani Hrp, N. A., Masruro, Z., Saragih, S. Z., Hasibuan, R., Simamora, S. S., & Toni, T. (2022). Buku ajar belajar dan pembelajaran. Bandung: Widina Bhakti.
- Aritonang. (2023). Analisis permasalahan pembelajaran PPKn: Objek kajian di SMA Negeri 18 Medan. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(6), 155-161.
- Danuri. (2019). Metode penelitian pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dhewantoro, H. N. S. (2018). Strategi peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi berkarakter. In *Prosiding Seminar Nasional IKA UNY "Profesionalisme Guru Abad XXI"* (pp. 103-111).
- Dolong, J. (2016). Teknik analisis dalam komponen pembelajaran. *Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 293-300.

- Herliani. (2021). Teori belajar dan pembelajaran. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jnckx>
- Juliansyah. (2011). Metodologi penelitian dalam karya ilmiah. Jakarta Selatan: Kencana.
- Karliani, E. (2016). Membangun civic engagement melalui model service learning untuk memperkuat karakter warga negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2).
- Lastari. (2023). Analisis permasalahan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Langkat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*, 4(2), 145-149. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i2.14708>
- Margiathi, S. A., Lerian, O., Wulandari, R., Putri, N. D., & Musyadad, V. F. (2023). Dampak konsentrasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik. *Jurnal Primary Edu*, 1(1), 62.
- Moleong. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhith, A. (2018). Problematika pembelajaran tematik terpadu di MIN III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 55-58.
- Parni, P. (2017). Faktor internal dan eksternal pembelajaran. *Tarbiya Islamica*, 5(1), 17-30.
- Putri, T. S. B., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2012). The roles of learning civic education in developing unity values. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(5).
- Putri. (2019). Pengaruh media film dokumenter terhadap peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan siswa dalam pembelajaran PPKn: Penelitian quasi eksperimental di kelas X SMA Kartika XIX-2 Bandung (Tesis Doktoral, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, S. M., & Sutama, S. (2016). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Varidika*, 27(2), 123-129.
<https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724>
- RimahDani, D. E., Shaleh, S., & Nurlaeli, N. (2023). Variasi metode dan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(1), 372-379. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.1828>
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Jakarta: KBM Indonesia.
- Samsudin, M. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi belajar. *Eduprof*, 2, ?
<https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i2.38>
- Sari, D. K., Manullang, G. E., Nst, I. B., & Siregar, W. M. (2024). Analisis permasalahan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada SD Negeri 106160 Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pubmedia: *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(3), 6. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.527>
- Suharni, S. (2021). Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 172-184. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v6i1.2198>
- Sukmawati. (2025). Strategi pembelajaran guru PPKn dalam mengatasi kurangnya minat belajar pada siswa di SMAN 5 Palu. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.4168>

- Sutikno, A. (2018). Upaya peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan diri. In Prosiding Seminar Nasional IKA UNY "Profesionalisme Guru Abad XXI" (Vol. 1, No. 1, pp. 45-57).
- Suyahman. (2020). Problematika dalam pembelajaran PPKn pada era COVID-19 di SMA Negeri 3 Sukoharjo. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(2), 70.
- Syam. (2022). Belajar dan pembelajaran. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Wisman, Y. (2020). Teori belajar kognitif dan implementasi dalam proses pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 11(1), 209-? * <https://doi.org/10.37304/jikt.v11i1.88>
- Wulansari, R. (2021). Problematika pembelajaran berbasis daring/e-learning dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 3 Kediri (Disertasi Doktoral). <https://doi.org/10.36088/islamika.v3i2.1242>
- Yuberti, Y. (2014). Teori pembelajaran dan pengembangan bahan ajar dalam pendidikan. Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).